



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN ATAU
KELOMPOK ORANG MISKIN DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lembaga Pemberi Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin Atau Kelompok Orang Miskin di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 123);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Lembaga Pemberi Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pemberi Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Pemberi Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Januari 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Lembaga Pemberi Bantuan Hukum bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
LEMBAGA PEMBERI BANTUAN
HUKUM UNTUK ORANG MISKIN
ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN DI
KABUPATEN BANTUL

DAFTAR LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN ATAU
KELOMPOK ORANG MISKIN DI KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA LEMBAGA BANTUAN HUKUM	ALAMAT
1.	Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH-UMY)	Fakultas Hukum UMY, Komplek Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Rajawali RT 01 Dk. II Gatak, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183, Telepon 082324109419
2.	Lembaga Bantuan Hukum Senopati	Jalan Mayjen Sutoyo No. 14, Bantul, Bantul, Bantul 55711, Telepon 082329431644 /089517616265
3.	Lembaga Bantuan Hukum Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) Bantul	Jalan Basuki Rahmad No. 8, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul 55711, Telepon 081578197068
4.	Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Yogyakarta	Nogosari RT 7, Trirenggo, Bantul, Bantul 55714, Telepon 0274-4295017/081246964994
5.	Lembaga Bantuan Hukum Tentrem	Nulis RT 3 Dk. I Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183, Telepon 087834929456
6.	Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) Sekar Melati	Gg. Flamboyan No.4 Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan, Bantul 55197, Telepon 0816685698

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH